



Pemprov Butuh Rp 430 Miliar

Untuk Tangani Dampak Pandemi Covid-19

JOGJA, Radar Jogja - Pemprov DIJ mengusulkan kebutuhan anggaran sekitar Rp 430 miliar untuk menanggulangi dampak Covid-19 di DIJ. Anggaran diperoleh dengan memanfaatkan dana tak terduga dan efisiensi dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) provinsi, APBD kabupaten/kota, maupun anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) »
► Baca *Pemprov...* Hal 7

MENANGGULANGI DAMPAK CORONA DI DIJ

Usulan Pemprov DIJ	Tahap pertama	Pemakaian
Rp 430 miliar Diperoleh dari: - Dana tak terduga. - Efisiensi APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, APBDes.	- Memenuhi kebutuhan sampai Mei. - Total kebutuhan sekitar Rp 430 miliar hingga akhir masa tanggap darurat. Angka terus bergerak.	- Bidang kesehatan Rp 39 miliar. - Bantuan sosial Rp 100 miliar. 76 ribu kepala keluarga, Data: awal perkembangan

GRAPIS: HEBERIS KARTUN/RADAR JOGJA

Sambungan dari hal 1

Kepala Seksi Sosial Budaya Bidang Anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIJ Prambudi Setiono

menjelaskan, upaya efisiensi mampu menghemat anggaran APBD provinsi hingga Rp 200 miliar. Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk penanganan pagebluk korona ini.

"Tahap pertama untuk memenuhi kebutuhan sampai Mei. Secara total kebutuhan sekitar Rp 430 miliar hingga akhir masa tanggap darurat. Angkanya masih bergerak seiring bertam-

bahnya orang dalam peman-tauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP)," jelasnya kemarin (14/4).

Anggaran digunakan untuk berbagai sektor, termasuk bidang

kesehatan yang mencapai Rp 39 miliar. Adapun untuk bantuan sosial Rp 100 miliar. "Anggaran bantuan sosial untuk 76 ribu kepala keluarga baru ditangani kabupaten kota. Datanya akan berkembang," ungkapnya.

Langkah efisiensi ditempuh dengan membatalkan puluhan proyek fisik selama setahun. Terutama proyek yang memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID). Juga pembatalan kegiatan perjalanan dinas, bimtek, dan pelatihan. "Proyek fisik yang sekiranya baru akan lelang, segera dibatalkan," tambahnya.

Gubernur DIJ Hamengku Buwo-

no X menjelaskan, finalisasi redesain APBD segera dilakukan. Saat ini tinggal menunggu laporan dari pemkab/pemkot.

Pemprov juga menunggu skema penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sebab, hal itu juga akan mempengaruhi pemanfaatan APBD. "Pemerintah juga memberi bantuan untuk orang miskin dan PHK. Jangan sampai pusat memberi, kami juga memberi," kata HB X.

Terkait tenaga kerja sektor informal yang terdampak, HB X telah memerintahkan tiap OPD untuk melakukan pendataan. Namun ia mengaku kesulitan mendata tenaga kerja asal

DIJ yang bekerja di luar daerah.

"Yang kami tidak tahu itu pendatang. Statusnya tidak tahu (apakah sudah menerima bantuan). Misalnya pegawai industri di Bekasi atau di Jakarta. Kalau pulang, saya khawatir daftar (program bantuan) lagi," jelasnya.

Sinkronisasi anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa sangat diperlukan. Agar penyaluran bantuan dapat lebih merata. "Kami tidak berani mengeluarkan kalau pusat belum keluar. Kecuali di sektor lain yang tidak ada kaitannya. Kalau dobel kan sayang. Kalau bisa dihindari," tandas HB X. (tor/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005